

Ketimpangan Sosial Ekonomi Usaha Produksi Rumput Laut di Kawasan Pesisir Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Socioeconomic Inequality in Seaweed Production Businesses in Coastal Areas of Pinrang Regency, South Sulawesi Province

*A. Nurul Mutmainnah¹, Muhammad Syukur², Muhammad Yusuf¹ dan Muhammad Rizki Citanegara³

¹Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Kampus Gunung Sari Baru, Jl. A.P. Pettarani, Makassar, Indonesia

³Program Studi Sosiologi Agama, Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 13 November 2025
Perbaikan naskah: 26 Februari 2026
Disetujui terbit : 13 April 2026

Korespondensi penulis:
Email: anurulmutmainnah@iainpare.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v12i1.17748>



ABSTRAK

Peningkatan produksi rumput laut di wilayah pesisir Indonesia kerap diposisikan sebagai indikator keberhasilan integrasi pasar global dan pembangunan ekonomi maritim. Namun, pada tingkat komunitas petani kecil, peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kapitalisme agraria beroperasi dalam subsektor rumput laut di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan menyoroti relasi patron–klien, ketergantungan utang, diferensiasi kelas, dan subordinasi gender sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial–ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam di Desa Wiring Tasi dan Desa Watang Suppa pada Juni–September 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara semi–terstruktur terhadap 75 informan, observasi partisipatif sepanjang siklus produksi, serta pemetaan partisipatif. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik bertahap yang mencakup proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi teoretik dengan kerangka kapitalisme agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani rumput laut terperangkap dalam relasi kekuasaan asimetris yang didominasi oleh patron lokal dan tengkulak, yang menguasai akses modal, sarana produksi, dan pasar. Utang berfungsi bukan sebagai modal produktif, melainkan sebagai mekanisme subsistensi yang mereproduksi kemiskinan struktural dan membatasi otonomi ekonomi petani. Perempuan, yang mendominasi pekerjaan pengikatan bibit dan pascapanen, mengalami subordinasi ganda sebagai pekerja informal berupah rendah dan pekerja domestik tak dibayar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi produksi rumput laut ke dalam pasar global justru memperkuat hierarki kelas dan relasi patronase lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani, reformasi pembiayaan mikro yang adil, serta perlindungan kerja bagi perempuan untuk memutus reproduksi ketimpangan dalam kapitalisme agraria pesisir.

Kata Kunci: ketimpangan sosial ekonomi; produksi; rumput laut; gender; patron–klien; Pinrang

ABSTRACT

The increasing production of seaweed in Indonesia's coastal regions is frequently presented as evidence of successful integration into global markets and maritime economic development. However, at the level of smallholder farming communities, such growth does not necessarily result in improved livelihoods. This study examines the operation of agrarian capitalism within the seaweed subsector in Pinrang Regency, South Sulawesi, by analyzing patron–client relations, debt dependency, class differentiation, and gender subordination as key mechanisms through which socioeconomic inequality is reproduced. This research adopts a qualitative approach based on fieldwork conducted in Wiring Tasi Village and Watang Suppa Village between June and September 2025. Data were collected through semi-structured interviews with 75 informants, participant observation throughout the entire production cycle, and participatory mapping. Data analysis was conducted using a staged thematic approach, encompassing data reduction, coding, categorization, and theoretical interpretation within the framework of agrarian capitalism. The findings reveal that seaweed farmers are embedded in asymmetrical power relations dominated by local patrons and middlemen who control access to capital, means of production, and markets. Debt operates not as productive capital but as a subsistence mechanism that reproduces structural poverty and constrains farmers' economic autonomy. Women, who are predominantly engaged in seed-tying and post-harvest activities, experience double subordination as low-paid informal workers and as unpaid domestic laborers. This study concludes that the integration of seaweed production into global markets has paradoxically reinforced class hierarchies and local patronage relations. Consequently, strengthening farmer organizations, reforming equitable microfinance schemes, and ensuring labor protection for women are essential measures to disrupt the ongoing reproduction of inequality within coastal agrarian capitalism.

Keywords: socioeconomic inequality; production; seaweed; gender; patron–client; Pinrang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika intensifikasi modal di wilayah pesisir Indonesia terjadi melalui perubahan sistem produksi rumput laut yang mengintegrasikan petani kecil ke dalam jaringan pasar nasional dan global.

Petani di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara telah mengadopsi rumput laut sebagai mata pencaharian alternatif, tetapi masih rentan akibat distribusi modal yang tidak merata antara patron dan klien (Rahmat & Neilson, 2023). Menurut

data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut Indonesia mencapai 9,12 juta ton pada tahun 2021. Potensi besar ini terlihat dari volume ekspor rumput laut Indonesia yang mencapai 180,6 ribu ton dengan nilai USD 455,7 juta hingga September 2022, meningkat 93 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor utama.

Industrialisasi dan ekspansi produksi rumput laut di pesisir Sulawesi Selatan mengakibatkan perubahan hubungan sosial-ekonomi, di mana akses terhadap ruang laut dan pasar kini lebih dikontrol oleh kelompok bermodal. Pemerintah dan lembaga donor mendorong pengembangan koperasi dan diversifikasi usaha untuk memperkuat petani kecil, namun dominasi patronase keluarga dan gender masih menjadi penghambat utama distribusi manfaat ekonomi (Langford, 2023).

Studi sebelumnya tentang kapitalisme agraria di Asia Tenggara dominan mengkaji komoditas pangan utama seperti padi, kelapa sawit, dan perkebunan, namun minim eksplorasi terhadap sektor akuakultur rumput laut yang mengalami transformasi kapitalis (Basyuni *et al.*, 2024). Analisis agraria kontemporer belum memberikan perhatian yang memadai pada dinamika kelas dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang melibatkan integrasi pasar global dengan struktur sosial lokal (Mengo *et al.*, 2023). Penelitian terdahulu lebih fokus pada dampak teknis dan ekonomi makro budidaya rumput laut, dengan mengabaikan aspek hubungan kekuasaan, subordinasi gender, dan stratifikasi kelas pada tingkat komunitas petani (Haryanti, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana kapitalisme agraria beroperasi dalam konteks spesifik rumput laut di Indonesia, terutama dampaknya terhadap diferensiasi kelas petani (Mengo *et al.*, 2023).

Studi hubungan patron-klien di Indonesia umumnya mengkaji komunitas agraris tradisional, namun kurang mengeksplorasi bagaimana patronase

beradaptasi dan bertransformasi dalam konteks industrialisasi dan integrasi pasar global. Penelitian terdahulu tentang patron-klien di Sulawesi Selatan dan Jawa (Rajab *et al.*, 2025) belum menganalisis secara mendalam bagaimana hubungan tersebut berevolusi ketika dihadapkan dengan kehadiran perusahaan industri dan perubahan teknologi produksi. Studi kontemporer menunjukkan bahwa hubungan patron-klien tidak hilang dengan modernisasi, tetapi mengalami transformasi menjadi bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks dan terintegrasi dengan sistem pasar kapitalis (Amanatin *et al.*, 2024; Rajab *et al.*, 2025). Hal tersebut menunjukkan perlunya analisis yang mengeksplorasi kontinuitas dan diskontinuitas hubungan patron-klien dalam konteks transformasi kapitalis agraria di sektor rumput laut.

Data produksi menunjukkan bahwa rumput laut merupakan komoditas utama dalam sektor budidaya perikanan Indonesia. Pada tingkat nasional, produksi rumput laut berada pada kisaran 9–10 juta ton per tahun selama periode 2019–2024. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 hingga sekitar 9,09 juta ton, produksi kembali meningkat hingga mencapai sekitar 9,85 juta ton pada tahun 2024. Dominasi produksi ini menunjukkan bahwa subsektor rumput laut memainkan peran strategis dalam perekonomian pesisir Indonesia dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama sektor perikanan. Berikut tabel data produksi rumput laut.

Analisis persentase menunjukkan bahwa kontribusi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap produksi rumput laut nasional berada pada kisaran 4–6 persen selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019 kontribusi provinsi ini mencapai sekitar 6,6 persen, kemudian menurun menjadi sekitar 4,2 persen pada tahun 2024. Penurunan relatif ini tidak selalu menunjukkan penurunan produksi provinsi, tetapi lebih mencerminkan ekspansi produksi di wilayah lain di Indonesia.

Sebaliknya, kontribusi Kabupaten Pinrang terhadap produksi Sulawesi Selatan justru menunjukkan tren peningkatan yang sangat

Tabel 1. Produksi Rumput Laut.

Tahun	Indonesia (Kg)	Sulawesi Selatan (Kg)	Pinrang (Kg)
2019	9.775.985.950	645.263.813	18.459.095
2020	9.618.420.810	403.178.392	14.243.750
2021	9.092.031.330	404.439.442	19.399.100
2022	9.234.267.610	408.054.180	23.641.400
2023	9.753.410.490	412.517.802	36.170.700
2024	9.853.604.060	413.914.083	40.549.300

Sumber: Portal Data KKP.

signifikan. Pada tahun 2019 kontribusi Pinrang hanya sekitar 2,86 persen, tetapi meningkat menjadi 9,79 persen pada tahun 2024. Dengan kata lain, dalam lima tahun kontribusi Pinrang terhadap produksi provinsi meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar dalam produksi nasional, sedangkan Kabupaten Pinrang menjadi salah satu sentra produksi penting di dalam provinsi tersebut. Oleh karena itu, wilayah pesisir Pinrang merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika produksi rumput laut serta hubungan sosial ekonomi yang terbentuk dalam sistem budidaya pesisir, termasuk hubungan produksi, distribusi nilai tambah, dan diferensiasi kelas dalam komunitas petani rumput laut.

Peningkatan ini didukung oleh luas lahan budidaya yang mencapai 3.020 hektar dan berdirinya perusahaan pengolahan rumput laut seperti PT Biota Laut Ganggang dengan kapasitas produksi tinggi. Meskipun demikian, peningkatan produksi ini tidak serta merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh petani rumput laut di wilayah tersebut. Banyak petani kecil terutama di desa pesisir seperti Wiring Tasi dan Watang Suppa tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, lahan, dan pasar, sehingga terjebak dalam ketergantungan struktural kepada patron dan tengkulak (Bernstein, 2019; White B, 2012).

Kajian terbaru menyoroti bahwa dominasi patron-klien dan feminisasi kerja informal tidak hanya terjadi dalam komoditas rumput laut di Indonesia, tetapi juga di komunitas agraria Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam (Langford, 2023; Rajab *et al.*, 2025). Penelitian ini juga menegaskan hasil studi teranyar yang menyatakan akses kredit mikro, modal produksi, serta inovasi kelembagaan cenderung terhambat oleh kontrol elite lokal dan jeratan utang subsisten (Adisel *et al.*, 2023; Rajab *et al.*, 2025).

Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi provinsi ini mencapai 1,63 juta ton pada tahun 2020, melampaui Nusa Tenggara Timur yang menghasilkan 1,03 juta ton. Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing menghasilkan 441,1 ribu ton, 419,9 ribu ton, dan 402,6 ribu ton (BPS, 2018). Posisi dominan ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul penting dalam rantai distribusi nasional. Namun data rantai nilai menunjukkan bahwa aktor hilir

seperti agen dan industri pengolahan memperoleh nilai tambah jauh lebih besar dibandingkan petani sebagai produsen primer. Pendapatan aktor utama dalam rantai nilai bahkan dapat mencapai delapan kali lipat dibandingkan petani, sementara petani rata-rata hanya menerima Rp24.333,00 per ton (MS *et al.*, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan adanya relasi produksi yang asimetris dan konsentrasi kontrol pasar pada aktor bermodal.

Kabupaten Pinrang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan intensifikasi kapitalisme agraria di sektor kelautan. Produksi rumput laut di wilayah ini meningkat signifikan selama periode 2010 sampai 2023, dengan luas lahan budidaya mencapai 3.020 hektar serta kehadiran industri pengolahan seperti PT Biota Laut Ganggang (Kelautan & Perikanan, 2024). Secara struktural, kondisi tersebut menunjukkan integrasi vertikal antara produksi hulu dan industri hilir. Namun pada tingkat komunitas, desa pesisir seperti Wiring Tasi dan Watang Suppa memperlihatkan keterbatasan akses petani kecil terhadap modal, lahan, dan pasar, sehingga ketergantungan terhadap patron dan tengkulak tetap bertahan (Bernstein, 2019). Dengan demikian, ekspansi produksi tidak serta merta menghapus relasi patronase, melainkan mentransformasikannya dalam kerangka pasar kapitalistik.

Secara teoretik, kapitalisme agraria merujuk pada proses transformasi sektor agraria dari sistem subsisten menuju produksi berbasis pasar yang berorientasi pada akumulasi kapital. Transformasi ini ditandai oleh komersialisasi produk, privatisasi sumber daya, diferensiasi kelas, serta penetrasi modal besar ke dalam struktur produksi (Bernstein, 2019; Imran Siswadi & Imam Yuliadi, 2025; Langford, 2023; Wibowo & Shohibuddn, 2023). Indikatornya meliputi konsentrasi kepemilikan sumber daya, penggunaan tenaga kerja upahan, ketimpangan distribusi hasil, serta dominasi mekanisme pasar dalam pengalokasian sumber daya agraria (Bernstein, 2019; Wibowo & Shohibuddn, 2023).

Meskipun demikian, literatur kapitalisme agraria di Asia Tenggara masih didominasi oleh kajian terhadap komoditas darat seperti padi dan kelapa sawit (Basyuni *et al.*, 2024), sementara sektor akuakultur rumput laut relatif kurang dieksplorasi sebagai arena pembentukan kelas dan reproduksi ketimpangan. Dalam konteks literatur yang secara spesifik mengkaji sektor rumput laut di Indonesia, terdapat tiga arus utama yang relatif mapan namun masih terfragmentasi. Pertama, studi rantai nilai tekanan global integrasi pasar, efisiensi distribusi, dan peluang peningkatan bagi produsen

lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Rahmat & Neilson (2023) dan Zamroni *et al.* (2011), namun cenderung mengabaikan dimensi hubungan kekuasaan yang membentuk akses terhadap pasar (Rahmat & Neilson, 2023; Zamroni *et al.*, 2011). Kedua, kajian patronase dan ekonomi politik pesisir, seperti McWilliam *et al.* (2020), Andriesse (2022), serta Semedi & Schneider (2020), telah mengidentifikasi pentingnya hubungan patron-klien dan ketergantungan struktural dalam komunitas nelayan, namun belum secara eksplisit hubungannya dengan dinamika kapitalisme agraria dan integrasi pasar global (Andriesse, 2022; McWilliam *et al.*, 2020; Semedi & Schneider, 2020). Ketiga, studi gender dalam perikanan dan ekonomi pesisir, misalnya Weeratunge *et al.* (2010), Torre-Castro *et al.* (2022), dan Rimmer *et al.* (2021), lebih banyak fokus pada pembagian kerja dan kerentanan perempuan, tanpa sensitivitas secara sistematis posisi perempuan dengan proses diferensiasi kelas dan akumulasi modal (Rimmer *et al.*, 2021; Torre-Castro *et al.*, 2022; Weeratunge *et al.*, 2010). Oleh karena itu, posisi penelitian ini diperkuat dengan pengisian pengintegrasian tersebut melalui penggunaan kapitalisme agraria sebagai alat baca relasional, yang memungkinkan penggabungan analisis rantai nilai global, patronase lokal, dan subordinasi gender ke dalam satu kerangka yang menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial dalam sektor rumput laut diproduksi dan direproduksi secara simultan.

Berangkat dari kesenjangan konteks dan empiris tersebut, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana strategi akumulasi modal berbasis tenaga kerja keluarga dan perempuan dikonstruksi dalam ekonomi rumput laut; (2) bagaimana ketimpangan akses terhadap modal, lahan, dan pasar direproduksi sehingga memicu kemiskinan terselubung dan ketergantungan terhadap pinjaman; serta (3) bagaimana kapitalisme agraria terartikulasikan dalam sistem produksi dan distribusi pendapatan rumput laut di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara relasional mekanisme akumulasi, distribusi, dan reproduksi ketimpangan dalam ekonomi rumput laut dengan menggunakan kapitalisme agraria sebagai alat baca terhadap keterkaitan antara struktur pasar global dan dinamika sosial lokal.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoritis, kajian ini memperluas cakupan analisis kapitalisme agraria ke sektor laut dengan mengintegrasikan dimensi patronase, utang,

diferensiasi kelas, dan gender dalam satu kerangka relasional. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan analisis dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih inklusif, khususnya dalam penguatan akses terhadap sumber daya, perlindungan kerja rumah tangga produksi, dan pengakuan terhadap peran ekonomi perempuan dalam rantai nilai rumput laut. Dengan demikian, pertumbuhan industri rumput laut tidak hanya dibaca sebagai ekspansi produksi, tetapi juga sebagai proses yang secara simultan mereproduksi maupun berpotensi mentransformasi ketimpangan sosial di tingkat mikro.

PENDEKATAN ILMIAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapitalisme agraria terartikulasikan dalam sektor budidaya rumput laut di Kabupaten Pinrang melalui mekanisme diferensiasi kelas, transformasi hubungan patron-klien, serta pengumpulan strategi berbasis tenaga kerja keluarga dan perempuan. Dalam kerangka ini, kapitalisme agraria digunakan sebagai alat baca analitis untuk menelusuri bagaimana hubungan produksi, distribusi nilai, dan kontrol atas sumber daya pesisir terbentuk melalui interaksi antara struktur pasar global dan praktik sosial lokal. Secara operasional, kapitalisme agraria digunakan untuk mengidentifikasi tiga dimensi utama, yaitu (1) pola kontrol atas alat produksi dan akses terhadap modal serta pasar sebagai dasar akumulasi, (2) mekanisme patronase dan utang sebagai instrumen yang didistribusikan dan kontrol hubungan produksi, serta (3) diferensiasi kelas dan pembagian kerja berbasis gender sebagai konsekuensi dari proses tersebut. Dimensi ini kemudian diturunkan ke dalam indikator empiris berupa kepemilikan dan kontrol alat produksi, akses terhadap modal dan pasar, pola utang dan patronase, skala produksi tahunan, serta pembagian kerja berbasis gender, yang digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman wawancara dan kerangka analisis temuan lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan relasi produksi, struktur kekuasaan, dan dinamika sosial dalam rantai nilai rumput laut. Sementara itu, data kuantitatif deskriptif digunakan untuk memperjelas konteks struktural dan memperkuat argumentasi empiris, bukan untuk melakukan analisis statistik inferensial atau pengujian hipotesis numerik. Dengan demikian, angka-angka produksi, luas lahan, nilai produksi, dan distribusi informan berfungsi sebagai penjelas kondisi objektif yang melatarbelakangi relasi sosial ekonomi.

Lokasi penelitian berada di Desa Wiring Tasi dan Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dalam data BPS Kabupaten Pinrang, terdapat sepuluh desa yang ada, namun dua desa dipilih secara purposif karena merupakan sentra produksi utama. Kedua desa memiliki jumlah penduduk 6.243 jiwa atau sekitar 24 persen dari populasi kecamatan. Kecamatan Suppa memiliki luas lahan budidaya rumput laut sebesar 3.582 hektare dengan produksi 3.749 ton, sehingga produktivitas rata-rata sekitar 1,04 ton per hektare. Pada tingkat kabupaten, produksi meningkat dari 18,4 juta kg pada 2019 menjadi 24,4 juta kg pada 2022 atau naik sekitar 32,6 persen, dengan nilai produksi meningkat dari Rp66,4 miliar menjadi Rp97,6 miliar atau sekitar 47 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2023). Data tersebut menunjukkan intensifikasi komersialisasi yang signifikan dan menjadi dasar pemilihan wilayah sebagai arena kajian kapitalisme agraria pesisir.

Berdasarkan data kecamatan, jumlah petani tercatat sebanyak 98 orang dan nelayan 139 orang, sehingga total populasi aktor pesisir utama mencapai 237 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2023). Penelitian ini mewawancarai 75 informan atau sekitar 31,6 persen dari total populasi

tersebut. Dalam konteks studi kualitatif komunitas terbatas, proporsi ini tidak hanya mencerminkan cakupan yang luas, tetapi juga memungkinkan tercapainya saturasi tematik, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan kategori analitis baru. Saturasi ditentukan secara iteratif selama proses pengumpulan data, di mana setelah sekitar 63–70 informan, pola temuan yang berkaitan dengan hubungan patronase, mekanisme utang, diferensiasi kelas, dan pembagian kerja berbasis gender mulai menunjukkan pengulangan yang konsisten, sehingga wawancara tambahan berfungsi sebagai konfirmasi, bukan eksplorasi kategori baru.

Pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling dan snowball sampling dengan kriteria: keterlibatan langsung dalam budidaya minimal tiga tahun, posisi struktural dalam rantai produksi, serta keterlibatan dalam akses modal atau distribusi hasil. Komposisi informan mencakup pemilik usaha, pekerja produksi, petani kecil, dan tengkulak, dengan 35 perempuan atau 46,7 persen dari total informan. Distribusi ini memastikan keterwakilan struktural dan memungkinkan analisis diferensiasi kelas serta pembagian kerja berbasis gender.



Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data.

Sumber: <https://peta.web.id/peta/kab/kabupaten-pinrang/>.

Tabel 2. Profil Informan.

Desa	Pemilik Usaha (parumpu)		Pekerja Pengikat Rumput Laut		Tengkulak		Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Wiring Tasi	11	3	6	13	6	3	42
Watang Suppa	9	5	4	8	5	2	33
Total	20	13	9	21	11	5	75

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif sepanjang siklus produksi, serta pemetaan partisipatif, kemudian ditranskripsi secara verbatim dan dianalisis menggunakan analisis tematik yang bersifat theory-driven dalam kerangka kapitalisme agraria. Analisis dilakukan melalui urutan berurutan, yaitu familiarisasi data melalui pembacaan berulang, pengkodean awal secara deduktif dan induktif berdasarkan kategori seperti akses modal, patronase, utang, diferensiasi kelas, dan pembagian kerja berbasis gender, pengelompokan kode menjadi tema-tema awal yang merepresentasikan mekanisme relasi produksi, peninjauan ulang tema melalui lintas sumber data untuk memastikan konsistensi, serta pendefinisian dan penajaman tema dengan mengikutinya secara eksplisit pada kerangka penerapan me agraria sebagai alat analisis. Tahap akhir berupa penyusunan narasi analitis yang mengintegrasikan seluruh tema untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur pasar, patronase, utang, diferensiasi kelas, dan subordinasi gender dalam konteks empiris sektor rumput laut. Dengan demikian, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif untuk memperkuat interpretasi data dalam penelitian ini memungkinkan integrasi antara penjelasan relasional di tingkat mikro dan gambaran struktural di tingkat makro, tanpa melakukan olahan statistik kompleks, tetapi tetap menjaga kekuatan empiris dan relevansi kebijakan dari temuan penelitian.

Akumulasi modal pada tenaga kerja Keluarga dan Perempuan

Desa Wiring Tasi dan Desa Watang Suppa terletak di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, memiliki kondisi wilayah pesisir yang unik dan potensi pengembangan rumput laut yang signifikan. Wilayah kedua tersebut berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi banyak penduduk, yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya laut, termasuk hasil perikanan dan hasil laut lain seperti rumput laut. Indonesia dikenal dengan garis pantainya yang panjang, dan sekitar 60 persen penduduknya tinggal di kawasan pesisir, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya ini.

Pengembangan dan pelestarian lingkungan pesisir sangat penting untuk mendukung ekonomi lokal, terutama bagi komunitas pesisir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan berbasis masyarakat di kawasan pesisir dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam (Pribadi, 2023). Dalam konteks Desa Wiring Tasi, potensi rumput laut yang ada dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumsi lokal tetapi juga

untuk pasar yang lebih luas. Di Kabupaten Pinrang, rumput laut merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Agam, 2019).

Kondisi pesisir di Desa Wiring Tasi juga mencakup padang lamun yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies laut. Padang lamun merupakan elemen kunci dalam ekosistem pesisir, berkontribusi terhadap kesehatan laut dan dapat berfungsi sebagai penopang bagi kegiatan ekonomi lokal seperti perikanan dan budidaya rumput laut. Ketersediaan area yang sehat dan terjaga akan padang lamun menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan usaha perikanan serta rumput laut masyarakat (Sunaryo, 2021).

Masyarakat Desa Wiring Tasi telah lama bergelut dalam produksi rumput laut sebagai komoditas yang menjanjikan secara ekonomi dan relatif mudah diterapkan dalam skala rumah tangga dengan siklus produksi yang singkat (Haryanti, 2021). Kondisi ini menjadikan rumput laut sebagai dasar utama penghidupan rumah tangga pesisir, sebagaimana diungkapkan oleh informan,

“rumput laut menjadi sumber pemasukan utama kami, selalu terjual meskipun harga tidak stabil” (laki-laki petani, 57 tahun, 15/07/2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepastian penyerapan komoditas tidak diikuti oleh stabilitas harga, sehingga produsen kecil berada dalam posisi rentan terhadap pasar. Dalam kerangka kapitalisme agraria, temuan ini menegaskan bahwa integrasi ke pasar tidak secara otomatis meningkatkan posisi produsen tawar, melainkan justru menciptakan ketergantungan struktural terhadap mekanisme harga yang dikendalikan di luar komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi rantai nilai rumput laut di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterhubungan dengan pasar global sering kali terjadi tanpa redistribusi nilai yang adil bagi produsen kecil (Rahmat & Neilson, 2023; Zamroni et al., 2011).

Dinamika ini semakin diperkuat dengan meningkatnya harga rumput laut pada periode 2022–2023 yang mencapai Rp40.000,00–45.000,00, yang mendorong masuknya tenaga kerja baru, termasuk perantau yang kembali ke desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspansi komoditas tidak hanya memicu intensifikasi produksi, tetapi juga restrukturisasi tenaga kerja dan mobilitas sosial,

sebagaimana dicatat oleh Fithri (2019). Salah satu informan menyatakan,

“Saya dulu 7 tahun tinggal di Kalimantan, kemudian kembali ke kampung halaman di Wiring Tasi menjadi petani rumput laut... saat itu harga rumput laut sangat mahal hingga Rp45.000,00 membuat saya tertarik jadi petani rumput laut” (laki-laki, 57 tahun, 15 Juni 2025).

Temuan ini dapat dibaca sebagai bentuk akumulasi awal berbasis migrasi, di mana modal yang dikumpulkan di luar sektor agraria diinvestasikan kembali ke produksi komoditas. Namun demikian, berbeda dari asumsi klasik, investasi tersebut tidak diikuti oleh kontrol penuh atas sarana produksi, karena sebagian petani hanya memiliki alat produksi tanpa menguasai ruang produksi.

Hal ini terlihat dari penggunaan modal awal sekitar Rp7.000.000 untuk pembangunan fasilitas produksi sederhana, yang tetap bergantung pada akses lahan milik pihak lain. Seorang informan menyatakan, “rumah kecil dibangun untuk menyimpan tali, botol, dan jaring. Sebelum membangun harus minta izin dulu sama pak La Mangku yang punya lahan ini” (perempuan petani, 33 tahun, 15 Juni 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan alat produksi dan penguasaan ruang produksi, yang dalam perspektif kapitalisme agraria menandai keterbatasan kontrol produsen kecil terhadap faktor strategi produksi. Temuan ini memperluas konsep produksi komoditas kecil, di mana produksi dilakukan secara mandiri tetapi tetap berada dalam batasan struktural yang ditentukan oleh akses lahan, modal, dan jaringan distribusi. Studi sebelumnya tentang ekonomi pesisir juga menunjukkan pola serupa, di mana produsen kecil tetap terintegrasi dalam sistem kapitalis tanpa memiliki kontrol penuh atas nilai rantai (McWilliam *et al.*, 2020; Andriesse, 2022).

Lebih lanjut, struktur produksi ini ditentukan oleh dominasi tenaga kerja keluarga, di mana 58 dari 75 informan (77,3 persen) menggunakan tenaga kerja keluarga dan 46,7 persen di antaranya adalah perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa

strategi akumulasi dalam sektor rumput laut sangat bergantung pada mobilisasi tenaga kerja domestik, yang sering kali tidak diakui secara formal sebagai bagian dari produksi ekonomi. Dalam kerangka kapitalisme agraria, kondisi ini menyatakan bahwa reproduksi tenaga kerja keluarga, khususnya perempuan, menjadi dasar penting dalam menjaga efisiensi produksi sekaligus menekan biaya. Hal ini sejalan dengan literatur gender dalam ekonomi perikanan yang menunjukkan bahwa kerja perempuan sering kali bersifat invisibel tetapi krusial dalam proses akumulasi (Weeratunge *et al.*, 2010; Torre-Castro *et al.*, 2022; Rimmer *et al.*, 2021). Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menggambarkan praktik produksi lokal, tetapi juga memperkuat argumen bahwa kapitalisme agraria di sektor kelautan beroperasi melalui kombinasi antara integrasi pasar, pembatasan kontrol produksi, dan eksploitasi tenaga kerja keluarga berbasis gender.

Tabel menunjukkan dominasi penggunaan tenaga kerja keluarga di kedua desa, dengan proporsi lebih tinggi di Watang Suppa (89 persen) dibandingkan Wiring Tasi (86 persen). Perbedaan ini menunjukkan bahwa Watang Suppa relatif lebih bergantung pada mobilisasi tenaga kerja domestik sebagai strategi efisiensi biaya, sementara Wiring Tasi sedikit lebih terbuka terhadap penggunaan tenaga kerja non-keluarga. Dalam kerangka kapitalisme agraria, dominasi tenaga kerja keluarga menunjukkan bahwa rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai unit konsumsi, tetapi juga sebagai unit produksi yang menyerap biaya tenaga kerja tanpa melalui mekanisme upah formal.

Temuan ini memperluas literatur tentang produksi komoditas kecil di sektor pesisir, di mana produksi berbasis keluarga memungkinkan integrasi ke pasar tanpa transformasi penuh menjadi tenaga kerja upahan (McWilliam *et al.*, 2020; Andriesse, 2022). Dengan demikian, struktur kerja di kedua desa menunjukkan bahwa akumulasi modal tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga kerja formal, tetapi pada eksploitasi tenaga kerja keluarga sebagai dasar efisiensi produksi. Hal ini menjawab rumusan masalah pertama, bahwa akumulasi strategi dalam sektor rumput laut bertumpu pada mobilisasi tenaga kerja keluarga sebagai mekanisme pengurangan

Tabel 3. Tabel Status Hubungan Kerja Petani Rumput Laut.

Desa	Total Informan	Bekerja dengan Keluarga	Persentase (%)	Tidak dengan Keluarga	Persentase (%)
Wiring Tasi	42	36	86	6	14
Watang Suppa	33	29	89	4	11
Total	75	65	86,7	10	13,3

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

biaya produksi.

Pekerja pengikat rumput laut memperoleh rata-rata Rp900.000 per bulan atau sekitar 26 persen dari UMP Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar Rp3.434.298, yang menunjukkan kesenjangan sekitar Rp2,5 juta per bulan. Seperti yang dinyatakan oleh petani perempuan sebagai pekerja pengikat rumput laut,

“Upah yang dikasih untuk ikat rumput laut itu Rp4.000,00 setiap tali, dan upahnya kalau ada uang di bayar langsung. Tapi lebih sering terjual rumput laut baru di bayar upah ikat rumput lautnya” (perempuan petani 43 tahun, 13 Juni 2025).

Pola pembayaran ini menunjukkan bahwa upah tidak hanya rendah, tetapi juga bersifat tertunda dan bergantung pada keberhasilan penjualan, sehingga risiko pasar dialihkan kepada pekerja. Kondisi ini menegaskan bahwa tenaga kerja perempuan berada dalam posisi semi proletariat, yaitu bekerja untuk upah namun tanpa perlindungan kerja formal dan tetap terikat dalam unit produksi keluarga. Dalam perspektif kapitalisme agraria, hal ini merefleksikan eksternalisasi risiko produksi ke tenaga kerja, di mana menutupi harga dan menutupi pasar tidak ditanggung oleh pemilik modal, tetapi oleh pekerja. Temuan ini sejalan dengan studi gender dalam perikanan yang menunjukkan bahwa feminisasi kerja informal menjadi strategi sistemik untuk menekan biaya produksi (Weeratunge et al., 2010; Torre-Castro et al., 2022). Secara kuantitatif, rasio upah terhadap UMP sebesar 0,26 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi, yang mengindikasikan nilai distribusi yang tidak proporsional dalam rantai produksi. Dengan demikian, temuan ini menjawab rumusan masalah kedua, yaitu reproduksi ketimpangan melalui mekanisme upah rendah dan transfer risiko hingga tenaga kerja.

Pekerja perempuan umumnya bekerja di beberapa lokasi secara bersamaan untuk menambah pendapatan, namun tetap berada dalam posisi rentan. diungkapkan informan,

“upah yang saya dapatkan meningkat, tahun 2010 saya diupah sekitar Rp500.000,00 setiap bulan, sekarang tahun 2025 bisa sampai Rp1.000.000,00 namun upahnya juga tidak langsung saya dapatkan, rumput laut terjual baru dibayarkan upahnya, saya terima saja apapun yang saya dapatkan karena bisa menambah uang belanja rumah saya” (perempuan petani 39 tahun, 12 Juni 2025).

Secara nominal, terjadi peningkatan upah, namun jika dikaitkan dengan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan tersebut tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan. Fenomena ini menunjukkan adanya ilusi mobilitas ekonomi, dimana peningkatan pendapatan tidak diikuti oleh peningkatan daya beli. Dalam kerangka kapitalisme agraria, kondisi ini menegaskan bahwa akumulasi pada tingkat makro tidak selalu berimplikasi pada kesejahteraan tenaga kerja, melainkan justru memperkuat posisi subordinat pekerja perempuan dalam struktur produksi. Literatur sebelumnya juga menunjukkan bahwa kerja perempuan dalam sektor perikanan sering kali menjadi penyangga ekonomi rumah tangga tanpa diikuti peningkatan akses terhadap sumber daya (Macusi et al., 2021; Rimmer et al., 2021). Hal ini memperkuat rumusan masalah pertama dan kedua, khususnya terkait strategi akumulasi berbasis tenaga kerja perempuan dan reproduksi ketimpangan berbasis gender.

Petani yang memiliki modal produksi dan fasilitas sederhana disebut parumpu, yang berfungsi sebagai penghubung antara produksi dan pasar melalui tengkulak. Salah satu informan menyatakan:

“dari tahun 2009 hingga saat ini, penjualan rumput laut saya berikan ke tante saya yang menjadi tengkulaknya. Tante saya yang kasih modal dan mengajak saya kesini untuk menjadi petani dan dia juga yang membeli basil rumput laut kering saya” (Laki-laki petani 23 tahun, 12 Juni 2025).

Relasi ini menunjukkan bahwa akses pasar tidak bersifat terbuka, melainkan terikat pada hubungan patronase yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa patronase tetap menjadi mekanisme utama dalam mengatur akses pasar di sektor pesisir (Guérin, 2014; Semedi & Schneider, 2020). Dalam perspektif kapitalisme agraria, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi ke pasar global tidak menghilangkan hubungan patron-klien, tetapi justru menginstitutionalisikannya dalam bentuk kontrol distribusi oleh perantara. Wiring Tasi cenderung menunjukkan patronase yang lebih kuat dibandingkan Watang Suppa, ditandai dengan hubungan eksklusif dengan tengkulak dan ketergantungan pada modal awal dari patron.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Wiring Tasi dan Watang Suppa menunjukkan variasi dalam strategi produksi, tetapi keduanya tetap berada dalam kerangka kapitalisme agraria

yang ditandai oleh dominasi tenaga kerja keluarga, ketimpangan upah yang signifikan, serta kuatnya relasi patronase dalam mengontrol distribusi. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi rumput laut tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga mereproduksi ketimpangan melalui mekanisme tenaga kerja murah, transfer risiko, dan keterbatasan akses pasar.

Ketimpangan Akses dan Ketergantungan pinjaman modal

Perubahan struktur pekerjaan di Desa Watang Suppa menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari sektor pertanian sawah dan perikanan tradisional ke budidaya rumput laut. Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks transformasi ekonomi regional. Berdasarkan data BPS (2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang meningkat dari 2,91 persen pada 2019 menjadi 4,19 persen pada 2020 akibat pandemi, kemudian menurun pada 2022 dan kembali meningkat pada 2023. Sektor pertanian menyerap 32,7 persen angkatan kerja dan manufaktur 22,4 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2023). Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer dan informal di wilayah pesisir membentuk kerentanan struktural yang secara langsung membatasi pilihan ekonomi generasi muda, terutama mereka dengan pendidikan menengah. Seorang remaja yang dulunya pengangguran memiliki alasan tertentu menjadi petani rumput laut, berikut pernyataannya

“saya memiliki orang tua petani yang kerja di lahan orang, kami tidak memiliki lahan sehingga hanya berharap pada orang yang punya lahan, pendapatan pas-pasan, hingga saya harus juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Saat itu, saya masih SMA dan berhenti sekolah menjadi petani rumput laut. Jadi petani karena diajak om, alatnya punya om, saya hanya disuruh menebar tali yang sudah diikat benih rumput laut dan mengawasi setiap hari” (laki-laki petani 23 tahun, 13 Juni 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam produksi rumput laut tidak didorong oleh rasionalitas kewirausahaan, melainkan oleh keterpaksaan struktural akibat keterbatasan akses terhadap lahan, pendidikan, dan pekerjaan formal. Dalam kerangka kapitalisme agraria, situasi ini merefleksikan pemisahan antara produsen langsung dan alat produksi, di mana individu tetap terlibat dalam produksi tetapi tanpa kontrol atas

sarana produksi utama (Bernstein, 2019). Temuan ini memperkuat argumen bahwa integrasi ke sektor komoditas tidak selalu memperluas mobilitas sosial, tetapi justru mereproduksi ketergantungan tenaga kerja muda dalam struktur produksi yang timpang, sekaligus menjawab bahwa strategi akumulasi dalam sektor ini dibangun di atas keterpaksaan struktural, bukan pilihan bebas.

Transisi struktural juga terlihat pada peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian sawah ke budidaya rumput laut, terutama di Desa Watang Suppa yang mengalami modernisasi pertanian lebih intensif. Penggunaan mesin panen mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan mendorong eksklusi pekerja dari sektor pertanian, sebagaimana dinyatakan informan

“saya dabulu petani sawah yang kerja di lahan orang, tetapi karena pemilik sawah sudah memakai mesin panen padi, jadi saya sudah jarang dipanggil. Saya terpaksa pinjam modal ke tengkulak untuk membuat usaha rumput laut, hasil dari usaha dijual ke tengkulak dan dikurangi utang. Hasil yang saya dapatkan hanya setengah dari hasil penjualan, namun jika saya butuh uang lagi saya tinggal pinjam lagi ke tengkulak” (Perempuan petani, 43 tahun, 15 Juni 2025).

Peralihan ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak menghilangkan kerentanan, melainkan memindahkannya ke sektor lain yang tetap berada dalam hubungan ketergantungan. Dibandingkan dengan Wiring Tasi, Watang Suppa menunjukkan tingkat keterpaksaan yang lebih tinggi dalam sektoral migrasi akibat mekanisasi, sehingga ketergantungan terhadap utang dan patron cenderung lebih kuat. Dalam perspektif kapitalisme agraria, fenomena ini mencerminkan proses diferensiasi kelas yang didorong oleh teknologi, di mana sebagian aktor kehilangan akses terhadap sumber produksi dan terdorong masuk ke sektor lain dalam posisi subordinat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur agraria dan pesisir yang menunjukkan bahwa modernisasi sering kali menghasilkan perpindahan tenaga kerja tanpa menyediakan alternatif yang setara (Azadi *et al.*, 2022b; Semedi & Schneider, 2020), sehingga memperkuat reproduksi ketimpangan struktural antar sektor.

Petani di desa Wiring Tasi maupun desa Watang Suppa memiliki pola utang, dimana petani meminjam uang ke tengkulak, pekerja meminjam uang ke petani dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sumber Utang dan Modal Berdasarkan Informan.

Kategori Aktor	Tengkulak	BRI (KUR)	Parumpu	Modal Sendiri	Total	Persentase (%)
Tengkulak	–	6	–	10	16	21,3
Parumpu (Pemilik usaha)	16	9	–	8	33	44,0
Pekerja pengikat	12	–	18	–	30	40,0
Total	28	15	18	18	75	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

Data diatas menjelaskan Distribusi sumber utang menunjukkan adanya perbedaan akses modal antaraktor dalam produksi rumput laut. Kelompok parumpu yang berjumlah 33 orang (44 persen) memiliki sumber pembiayaan yang lebih beragam, yaitu dari tengkulak, kredit BRI, dan modal sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilik usaha memiliki kapasitas akumulasi modal yang relatif lebih besar dibanding kelompok lain.

Sebaliknya, pekerja pengikat yang berjumlah 30 orang (40 persen) sebagian besar bergantung pada pinjaman dari parumpu dan tengkulak, sehingga posisi mereka berada pada tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Sementara itu, tengkulak yang hanya berjumlah 16 orang (21,3 persen) justru memiliki modal yang relatif lebih stabil karena berasal dari modal sendiri dan akses kredit bank. Dalam perspektif kapitalisme agraria, perbedaan akses pembiayaan ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap sumber modal menjadi faktor penting dalam membentuk diferensiasi kelas antara pemilik usaha, perantara pasar, dan tenaga kerja produksi.

Salah satu tengkulak memberikan pernyataan,

“saya sering memberikan modal kepada petani rumput laut, jadi modal awal saya berikan, mereka tidak boleh menjual hasilnya kepada tengkulak lain, hanya pada saya mereka menjual. Karena sekarang banyak persaingan, kalau tidak ada begitu bisa diambil orang lain rumput lautnya” (tengkulak perempuan 41 tahun ,10 Juni 2025).

Kejadian yang sama dialami oleh salah satu petani ketika dia memulai usaha rumput laut, berikut pernyataannya

“di tahun 2017 awal saya menjadi rumput laut diajak oleh La Mangku yang merupakan pemilik usaha dan lahan. Lahan yang dimiliki oleh beliau berdekatan dengan laut yang sangat bagus untuk budidaya rumput laut. Akan tetapi saya tidak memiliki modal, lalu dia memberikan modal hingga Rp20.000.000,00 saat itu dengan perjanjian semua hasil rumput laut dia yang beli

dengan harga dibawah harga pasar, saat itu harga rumput laut Rp10.000,00, dan dia membargai rumput laut saya yaitu Rp8.000,00. Sekarang utang sudah lunas jadi saya sudah bisa menjual rumput laut saya ke tengkulak lain” (Perempuan petani 43 tahun, 13 Juni 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberian modal tidak bersifat netral, melainkan menjadi instrumen untuk mengunci jalur distribusi dan mempertahankan kendali atas komoditas. Praktik serupa dialami oleh petani yang menerima modal awal sebesar Rp20.000.000 dengan kewajiban menjual hasil di bawah harga pasar, yakni Rp8.000 ketika harga pasar Rp10.000. Selisih harga sebesar 20 persen tersebut menunjukkan adanya mekanisme ekstraksi surplus melalui kontrol harga, di mana nilai lebih dari produksi tidak dinikmati oleh produsen, tetapi diteruskan kepada pemilik modal. Dalam perspektif kapitalisme agraria, hubungan ini mencerminkan bentuk unequal exchange yang memperkuat posisi patron dalam mengakumulasi kapital, sekaligus menempatkan petani dalam ketergantungan struktural. Temuan ini sejalan dengan studi tentang patronase dan utang di sektor agraria yang menunjukkan bahwa hubungan kredit sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol produksi dan distribusi, bukan sekadar pembiayaan (Guérin, 2014; White, 2012).

Ketergantungan tersebut semakin diperkuat oleh normalisasi utang dalam kehidupan sehari-hari petani. Pernyataan dari petani,

“Utang merupakan hal yang sulit bagi kami tinggalkan, utang membantu kami memenuhi kebutuhan hidup, kalau butuh uang sekolah dan tidak ada uang, tinggal minta ke tengkulak dan nanti dibayar pakai rumput laut” (perempuan petani, 43 tahun 2025, 12 Juni 2025).

Dalam kasus ini, pemilik lahan dan modal (La Mangku) tidak hanya menyediakan sarana produksi, tetapi juga mengontrol pasar hasil panen melalui sistem pembelian dengan harga di bawah pasar. Meskipun petani bekerja secara mandiri, nilai kerja surplus yang dihasilkan tidak dinikmati sepenuhnya

oleh dirinya, melainkan diserap oleh pemilik modal melalui mekanisme harga yang timpang. Pernyataan petani akan hal tersebut,

“penghasilan yang saya dapatkan dari rumput laut tidak pernah sampai Rp3.000.000,00 setiap bulan, karena setiap jual dipotong dengan utang, teman petani ada yang kerja sampingan jadi kuli bangunan. Kalau saya tidak pernah pindah, terus menjadi petani rumput laut, beruntung ada tengkulak selalu mau kasih saya dana kalau kekurangan” (Perempuan petani 47 tahun, 13 Juni 2025).

Hampir semua petani mengatakan hal yang sama, bahwa mereka memiliki utang kepada tengkulak. Harga yang selalu rendah serta pendapatan yang tidak stabil membuat utang menjadi jalan satu-satunya untuk bertahan menjadi petani rumput laut.

Seringkali petani juga ditawarkan pinjaman lunak kredit usaha rakyat oleh Bank, dengan pelunasan berdasarkan pada hasil panen. Seorang petani pernah melakukan pinjaman bank, namun dia harus berhutang lagi ke tengkulak untuk melunasi pinjaman tersebut, seperti pernyataan petani

“saat covid, pernah mengajukan pinjaman ke bank sekitaran Rp15.000.000,00 di tahun 2020 untuk tambah modal usaha rumput laut, waktu itu sekalian beli perahu kecil, tetapi belum ada 2 bulan, panen banyak rusak, hasil penjualan sedikit tidak bisa menutupi cicilan. Jadinya, saya ambil lagi di tengkulak untuk lunasi utang di bank” (perempuan petani 43 tahun, 13 Juni 2025)

Setelah utangnya lunas, petani tersebut mengaku dapat menjual hasilnya ke tengkulak lain, yang menunjukkan adanya ruang mobilitas terbatas, namun tetap dalam kerangka pasar yang dikendalikan oleh jaringan pengumpul dan tengkulak. Ini menegaskan bahwa proletarianisasi dalam kapitalisme agraria tidak selalu linier, melainkan seringkali bersifat ambigu, di mana

petani berada dalam status sebagai semi-proletariat yang bekerja mandiri namun tergantung secara struktural pada modal dan pasar (Bernstein, 2019; White B, 2012). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pola utang, kontrol harga, dan keterbatasan akses pasar membentuk mekanisme reproduksi ketimpangan yang sistematis dalam sektor rumput laut.

Kapitalis Agraria Petani Rumput Laut di Kabupaten Pinrang

Transformasi kerja di sektor pesisir telah melahirkan generasi baru petani muda yang masuk ke dalam usaha budidaya rumput laut bukan atas dasar pilihan rasional ekonomi, tetapi sebagai bentuk respons terhadap tekanan struktural dan keterbatasan sosial. Informan remaja berusia 23 tahun yang berhenti sekolah untuk menjadi petani rumput laut karena desakan ekonomi keluarga menggambarkan bagaimana kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, seperti lahan dan alat, mendorong generasi muda ke dalam dunia kerja informal dan berisiko. Remaja ini bekerja di lahan milik orang lain dan menggunakan alat produksi milik kerabatnya, menandakan bahwa dia tidak memiliki kontrol atas alat produksi maupun hasil kerjanya. Berikut data Akumulasi modal Produksi Rumput Laut dari informan.

Data produksi dan pendapatan menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang tajam antara tiga kategori aktor utama dalam rantai produksi rumput laut, yaitu petani pemilik alat produksi (parumpu), tengkulak, dan pekerja pengikat. Ketimpangan tersebut dapat dianalisis melalui perbandingan skala produksi, nilai tambah yang diterima, serta posisi struktural masing-masing aktor dalam relasi produksi.

Secara kuantitatif, petani pemilik alat produksi (parumpu) yang mengelola sekitar 200 bentang mampu menghasilkan produksi sekitar 84.000 kg rumput laut per tahun. Dengan harga rata-rata Rp3.500 per kg, estimasi pendapatan tahunan mencapai sekitar Rp294.000.000. Posisi ini

Tabel 5. Tabel Akumulasi Modal Produksi Rumput Laut di Desa Wiring Tasi dan Watang Suppa.

Kategori Aktor	Skala Produksi / Peran	Produksi per Tahun (kg)	Harga (Rp/kg)	Estimasi Pendapatan Tahunan (Rp)
Petani pemilik alat produksi (parumpu)	±200 bentang	84.000	3.500	294.000.000
Tengkulak	Pengumpul dan distributor	±84.000–100.000	5.500–7.500	±168.000.000–336.000.000
Pekerja pengikat	Upah Rp3.000–Rp4.000 per bentang	–	–	5.400.000–12.000.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

menunjukkan bahwa penguasaan sarana produksi seperti tali, bibit, dan akses ruang laut memungkinkan parumpu mengakumulasi nilai produksi dalam skala yang relatif besar dibandingkan aktor lain di tingkat produksi.

Namun demikian, nilai tambah terbesar justru muncul pada tengkulak sebagai pengumpul dan distributor. Tengkulak membeli rumput laut dari petani dengan harga sekitar Rp3.500 per kg, kemudian menjual kembali dengan harga sekitar Rp5.500–Rp7.500 per kg. Dengan volume distribusi sekitar 84.000–100.000 kg per tahun, estimasi pendapatan yang diperoleh dapat mencapai Rp168.000.000 hingga Rp336.000.000 per tahun. Perbedaan harga antara tingkat petani dan tingkat distribusi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tambah dalam rantai produksi tidak berada pada produsen primer, tetapi pada aktor yang menguasai jaringan pemasaran dan distribusi.

Sebaliknya, pekerja pengikat rumput laut berada pada posisi paling subordinat dalam struktur produksi. Pekerja memperoleh upah sekitar Rp3.000–Rp4.000 per bentang, dengan kapasitas kerja rata-rata 6–10 bentang per hari. Jika diasumsikan bekerja selama 25 hari per bulan, maka pendapatan tahunan hanya berkisar Rp5.400.000 hingga Rp12.000.000. Nilai ini jauh di bawah Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar Rp3.434.298 per bulan, atau sekitar Rp41.211.576 per tahun. Dengan demikian, pendapatan pekerja pengikat hanya mencapai sekitar 13–29 persen dari standar upah minimum tahunan.

Perbandingan pendapatan antaraktor memperlihatkan ketimpangan yang sangat besar. Pendapatan parumpu sekitar 25–50 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja pengikat, sedangkan pendapatan tengkulak dapat mencapai lebih dari 60 kali pendapatan pekerja. Rasio ini menunjukkan bahwa distribusi nilai tambah dalam rantai produksi rumput laut sangat tidak merata dan terkonsentrasi pada aktor yang menguasai modal dan akses pasar.

Dalam perspektif kapitalisme agraria, pola ini mencerminkan diferensiasi kelas yang terbentuk melalui penguasaan alat produksi dan jaringan distribusi. Parumpu berperan sebagai pemilik sarana produksi pada tingkat lokal, tengkulak berfungsi sebagai pengendali sirkulasi komoditas dalam pasar, sedangkan pekerja pengikat berposisi sebagai tenaga kerja berupah rendah yang menopang proses produksi. Relasi antara ketiga aktor ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak secara otomatis menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata,

karena nilai tambah cenderung terkonsentrasi pada aktor yang memiliki kontrol atas modal dan akses pasar, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan di komunitas pesisir.

Pada komunitas petani rumput laut di Pinrang, fenomena utang telah menjelma menjadi perangkat subsistensi yang vital dalam siklus hidup dan reproduksi sosial-ekonomi keluarga tani. Berdasarkan temuan lapangan, pengambilan utang oleh petani lebih banyak didorong kebutuhan harian seperti biaya konsumsi, pendidikan anak, perbaikan rumah, maupun untuk menambal defisit pendapatan saat panen gagal dan bukan murni dimaksudkan untuk akumulasi modal yang memperbesar kapasitas produksi. Proses inilah yang sesuai dengan konsepsi ‘petani subsisten yang terakumulasi utang’ sebagaimana dipaparkan oleh Bernstein (2010) dan White (2012), serta ditemui secara luas dalam riset agraria Asia-Afrika-Latin Amerika (Bernstein, 2019; White B, 2012).

Ketegantungan petani rumput laut terhadap utang kepada tengkulak membangun struktur relasi yang sangat asimetris dalam sistem agraria lokal di Pinrang. Tengkulak tidak hanya memberikan modal awal, tapi juga menjadi pengendali harga dan penentu mutlak saluran pemasaran hasil rumput laut. Kondisi ini berimplikasi langsung pada posisi tawar petani: mereka kehilangan otonomi dalam menentukan kapan dan kepada siapa menjual hasil panen. Seperti testimoni salah satu tengkulak: “saya sering memberikan modal kepada petani rumput laut, jadi modal awal saya berikan, mereka tidak boleh menjual hasilnya kepada tengkulak lain, hanya pada saya mereka menjual, kalau tidak bisa diambil orang lain rumput lautnya.” (tengkulak, perempuan, 41 tahun, 10 Juni 2025), pola monopsoni seperti ini jamak dijumpai (Rahmat & Neilson, 2023).

Pernyataan langsung dari salah satu tengkulak rumput laut di Desa Wiring Tasi memperlihatkan bagaimana kuasa ekonomi lokal dilembagakan melalui praktik pemberian modal yang disertai dengan pembatasan akses pasar. Tengkulak tersebut secara terang menyatakan bahwa petani yang menerima modal tidak diperkenankan menjual hasil produksinya kepada pihak lain, melainkan wajib menjual hanya kepada pemberi modal. Alasan utama dari praktik ini adalah persaingan antar tengkulak yang memicu penguncian relasi dagang, bukan melalui kontrak hukum formal, tetapi melalui koersi relasi ekonomi informal yang berbasis utang dan loyalitas paksa. Dengan demikian, mekanisme pasar yang seharusnya terbuka menjadi tertutup dan oligopolistik, dikuasai oleh segelintir aktor yang mengontrol sirkulasi modal sekaligus akses

distribusi.

Dalam kerangka kapital agraria, praktik seperti ini menggambarkan bentuk akumulasi dengan dominasi relasional, di mana petani kecil diposisikan sebagai penerima modal tanpa daya tawar. Bernstein (2010) menekankan bahwa dalam sistem agraria kapitalis, relasi kuasa tidak hanya berlangsung dalam proses produksi, tetapi juga secara krusial dalam sirkulasi dan distribusi hasil panen (Bernstein, 2019). Tengkulak dalam konteks ini tidak hanya memainkan peran sebagai pedagang, tetapi sebagai pemilik akses pasar, yang menentukan siapa yang boleh menjual, kepada siapa, dan dengan harga berapa. Hal ini membatasi kebebasan petani dalam menentukan nilai produk mereka sendiri, serta menciptakan struktur ketergantungan yang menguntungkan pemilik modal lokal.

Model relasi ini mencerminkan reproduksi bentuk eksploitasi agraria yang bersifat terselubung namun sistematis, di mana modal kecil yang diberikan di awal proses produksi menjadi alat untuk mengunci jalur distribusi dan memperkuat posisi dominan tengkulak dalam rantai nilai. Sementara petani berhadapan dengan risiko produksi, fluktuasi harga, dan utang yang terus berputar, tengkulak memperoleh kepastian pasokan dan keuntungan dari pengendalian pasar. Dengan demikian, praktik ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme agraria bekerja melalui mekanisme informal yang berbasis pada utang, relasi personal, dan monopoli distribusi, menciptakan situasi di mana petani tidak sepenuhnya menjadi subjek ekonomi, tetapi tetap berada dalam bayang-bayang subordinasi struktural.

Dampak relasi utang-produksi ini terekam jelas saat petani harus menjual dengan harga jauh di bawah pasar. Ilustrasi nyata dikisahkan oleh salah satu petani: “2017 awal saya jadi petani diajak La Mangku karena saya tidak punya modal, dia kasih sampai Rp20.000.000,00, lalu sepakat semua hasil rumput laut dia yang beli di bawah harga pasar” (Laki-laki petani 43 tahun, 13 Juni 2025). Bahkan, setelah cicilan utang lunas, kendali tengkulak tetap membatasi mobilitas petani, meski terjadi sedikit ruang “berpindah” tengkulak, tetap dalam ikatan struktural yang serupa. Fenomena ini sejalan temuan Moore (2010) di Amerika Latin dan pemaparan White (2012) tentang sirkulasi monopsoni di sektor agrarian (Razavi, 2009; White B, 2012).

Dalam perspektif kapitalisme agraria, situasi ini mencerminkan proses semi-proletarisasi, di mana individu yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai anggota keluarga petani subsisten kini bekerja secara terfragmentasi dalam struktur

produksi yang dikendalikan oleh aktor ekonomi lain. Bernstein (2010) menegaskan bahwa pemisahan produsen langsung dari akses terhadap tanah dan alat produksi adalah ciri utama dari dinamika kelas dalam kapitalisme agraria. Ketika generasi muda seperti ini masuk ke dalam kerja budidaya tanpa akses terhadap aset produktif dan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis atas nama pemilik modal lokal, maka yang terjadi adalah replikasi subordinasi kelas dalam bentuk baru. Dalam struktur seperti ini, petani menjelma menjadi semi-proletariat: mandiri secara teknis, namun tergantung struktural terhadap modal, tengkulak, dan pasar. Penghasilan petani rumput laut tidak pernah sampai Rp3.000.000,00, tiap jual selalu dipotong utang, teman petani ada yang kerja lain jadi kuli bangunan, tapi tetap jadi petani karena ada tengkulak yang selalu siap kasih dana. Ini membuktikan proletarianisasi dalam kapitalisme agraria bersifat tidak linier namun ambigu, mobilitas hanya terjadi dalam kerangka jaringan kuasa elite lokal (Bernstein, 2019).

Kapital agraria mendefinisikan ikatan utang seperti ini sebagai relasi eksploitasi modern, di mana hasil kerja surplus petani diserap melalui represi harga dan akses kredit yang menjerat (Bernstein, 2019). “Utang adalah hal sulit bagi kami tinggalkan, kalau butuh uang sekolah dan tak ada, tinggal minta ke tengkulak dan nanti dibayar pakai rumput laut” (petani perempuan, 43 tahun, 13 Juni 2025), tukas salah seorang informan menegaskan mekanisme survival dengan risiko keberlanjutan kemiskinan struktural.

Sementara upaya mengakses kredit lembaga keuangan formal (perbankan, KUR) kerap gagal menembus hambatan sistemik. Ketika seorang petani memperoleh KUR saat pandemi, namun gagal panen membuat cicilan macet, jalan keluar satu-satunya: kembali berutang ke tengkulak agar utang ke bank dapat segera dilunasi. Praktik “menanggung utang dengan utang” ini dilaporkan juga pada petani di India, Vietnam, dan Filipina (Ibnu, 2024; N Selwyn, 2004), memperlihatkan keterbatasan akses sumber modal yang adil dan memperkuat lingkaran setan kemiskinan.

Pada akhirnya, utang subsisten bukan sebagai modal produksi yang berfungsi sebagai sarana bertahan dari tekanan inflasi, panen gagal, dan ketidakpastian harga. Penelitian di Asia Tenggara, Amerika Latin maupun Indonesia menegaskan pentingnya intervensi: reformasi pembiayaan koperasi, perlindungan petani melalui penguatan posisi tawar, serta regulasi kredit mikro berbasis komunitas. Tanpa langkah substantif demikian,

utang petani tidak akan menjadi alat akumulasi, melainkan penanda kemiskinan berulang.

Upaya keluar dari perangkap utang dalam studi agraria telah diarahkan pada penguatan lembaga keuangan mikro yang pro petani kecil, pembentukan koperasi pemasaran, pengaturan fungsi tengkulak, reformasi kontrak harga, serta perlindungan hukum bagi kredit mikro dan buruh tani perempuan (Rahmat & Neilson, 2023). Temuan di Pinrang menegaskan bahwa hubungan utang dalam sistem produksi rumput laut lebih berfungsi menjaga keberlangsungan rumah tangga daripada mendorong peningkatan nilai, sehingga pola subsisten tetap dominan dalam kerangka kapitalisme agraria pesisir. Atas dasar itu, rekomendasi kebijakan perlu dirumuskan lebih operasional. Pertama, pembentukan koperasi pemasaran berbasis desa dengan skema penjualan kolektif dan kontrak harga minimum yang ditautkan pada harga acuan regional perlu diprioritaskan untuk meningkatkan farmer share dan memutus monopsoni lokal. Kedua, pengembangan pembiayaan mikro tanpa agunan melalui integrasi KUR perikanan dengan skema penjaminan berbasis kelompok (joint limb) dan penjadwalan ulang berbasis musim panen perlu juga untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Ketiga, diperlukan regulasi lokal yang membatasi praktik pembatasan penjualan eksklusif oleh pemberi modal serta mewajibkan transparansi harga di tingkat pengumpul. Keempat, penguatan perlindungan kerja bagi perempuan melalui standar upah minimum sektoral pesisir dan pengakuan kerja berbasis rumah tangga sebagai bagian dari sistem produksi menjadi penting untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja informal. Kelima, intervensi negara dalam bentuk penyediaan infrastruktur logistik dan akses langsung ke pasar ekspor melalui BUMDes atau kemitraan koperasi perlu dikembangkan untuk memperpendek rantai distribusi.

Secara teoretik, studi ini memberikan kontribusi bagi literatur ekonomi-politik perikanan pesisir di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kapitalisme agraria dalam konteks akuakultur tidak selalu beroperasi melalui konsentrasi kepemilikan lahan, melainkan melalui penguasaan alat produksi, jaringan distribusi, dan hubungan utang yang mengikat produksi dengan sirkulasi komoditas. Temuan ini memperluas pendekatan klasik dalam ekonomi politik agraria dengan memasukkan dimensi kelautan, di mana ruang produksi bersifat terbuka tetapi tetap dikontrol secara sosial dan ekonomi melalui patronase dan akses modal. Selain itu, diferensiasi kelas dalam sektor rumput laut posisi

terbukti terbentuk melalui dalam rantai produksi, bukan semata-mata melalui kepemilikan aset tetap, sehingga mencakup tentang produksi komoditas kecil dan semi-proletarisasi dalam konteks pesisir. Dengan demikian, studi ini menjembatani sastra agraria dengan studi perikanan pesisir yang selama ini cenderung terpisah.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus Pinrang penting sebagai representasi dinamika kapitalisme agraria di wilayah pesisir Indonesia, di mana ekspansi komoditas kelautan berjalan seiring dengan reproduksi ketimpangan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi dalam sektor unggulan seperti rumput laut tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila struktur hubungan produksi, distribusi, dan pembiayaan tetap dikuasai oleh aktor bermodal. Pola ini berpotensi terjadi di berbagai wilayah pesisir lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menjadikan Pinrang sebagai kasus kunci untuk memahami bagaimana integrasi pasar global, patronase lokal, dan mekanisme utang membentuk konfigurasi ketimpangan dalam ekonomi kelautan nasional. Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang berorientasi pada rekonstruksi akses modal, penguatan kelembagaan petani, dan pembukaan saluran pasar alternatif menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor perikanan dan akuakultur di Indonesia tidak hanya bersifat ekspansif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan dalam produksi rumput laut di Kabupaten Pinrang merupakan hasil dari kombinasi kontrol atas modal, kontrol atas pasar, relasi kerja berbasis keluarga dan gender, serta ketergantungan pada utang subsisten yang saling berkelindan dalam satu konfigurasi kapitalisme agraria pesisir. Pertama, strategi akumulasi tidak terutama ditentukan oleh kepemilikan lahan, tetapi oleh kemampuan menguasai alat produksi dan memobilisasi tenaga kerja keluarga, khususnya perempuan, sebagai basis efisiensi biaya. Kedua, reproduksi ketimpangan berlangsung melalui keterbatasan akses terhadap modal, lahan, dan pasar yang dilembagakan melalui relasi utang dan patronase, sehingga petani kecil tetap berada dalam posisi subordinat dan rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Ketiga, artikulasi kapitalisme agraria dalam sektor rumput laut termanifestasi melalui integrasi produksi lokal ke dalam jaringan distribusi yang dikendalikan oleh aktor bermodal, di mana kontrol harga dan akses pasar menentukan distribusi nilai lebih. Dengan

demikian, peningkatan produksi tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan, karena struktur relasional yang menggabungkan kontrol modal, kontrol pasar, relasi kerja keluarga dan gender, serta utang subsisten justru menjadi mekanisme utama dalam membentuk dan mereproduksi diferensiasi kelas di komunitas pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Litapdimas Kementerian Agama RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Parepare atas dukungan pendanaan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya perangkat desa di Desa Wiring Tasi dan Desa Watang Suppa, atas fasilitasi akses lapangan. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh informan penelitian, petani rumput laut, patron lokal, pekerja pengikat, tengkulak, dan penyuluh perikanan, serta rekan sejawat dan asisten lapangan. Seluruh tanggung jawab analisis dan interpretasi sepenuhnya berada pada penulis.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa setiap penulis berkontribusi terhadap pembuatan karya tulis ini. Penulis yang berkontribusi adalah A. Nurul Mutmainnah sebagai kontributor utama yang merancang ide penelitian, menyusun kerangka konseptual, melaksanakan penelitian lapangan, menganalisis data, serta mempersiapkan dan menyelesaikan naskah. Muhammad Syukur, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Rizki Citanegara berperan sebagai kontributor anggota yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, termasuk pengumpulan data, diskusi analitis, serta penelaahan dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip serta melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis sesuai dengan ketentuan penerbitan jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A., Suryati, S., & Riswanto, R. (2023). Portraying Patron-client in Fishermen Work Relationships: A Phenomenon from Bengkulu, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(1), 25–36. <https://doi.org/10.21580/JSW.2023.7.1.10852>
- Agam, B. (2019). Efektivitas Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Pinrang. *Jurnal Mina Sains*, 5(2), 11–27. <https://doi.org/10.30997/jms.v5i2.2359>

- Amanatin, E. L., Sekarningrum, B., & Supangkat, B. (2024). Pembangunan Kemiskinan: Implementasi Falsafah Banteng Loreng Binoncengan dalam Relasi Patron-Klien Kelompok Nelayan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 418–433. <https://doi.org/10.23887/JISH.V13I2.79275>
- Andriese, E. (2022). Local Divergence and Obstacles to Spur Inclusive Coastal Development in Iloilo Province, the Philippines. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 9(2), 147–164. <https://doi.org/10.1002/app5.348>
- Azadi, H., Ghazali, S., Ghorbani, M., Tan, R., & Witlox, F. (2022a). Contribution of Small-scale Farmers to Global Food Security: A Meta-analysis. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 103(6), 2715–2726. <https://doi.org/10.1002/jsfa.12207>
- Azadi, H., Ghazali, S., Ghorbani, M., Tan, R., & Witlox, F. (2022b). Contribution of Small-scale Farmers to Global Food Security: A Meta-analysis. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 103(6), 2715–2726. <https://doi.org/10.1002/jsfa.12207>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2023). Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik*, (1), 1–14. <https://pinrangkab.bps.go.id>
- Basyuni, M., Puspita, M., Rahmania, R., Albasri, H., Pratama, I., Purbani, D., Aznawi, A. A., Mubaraq, A., Al Mustaniroh, S. S., Menne, F., Rahmila, Y. I., Salmo, S. G., Susilowati, A., Larekeng, S. H., Ardli, E., & Kajita, T. (2024). Current biodiversity status, distribution, and prospects of seaweed in Indonesia: A systematic review. *Heliyon*, 10(10), e31073. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2024.E31073>
- Bernstein, H. (2019). Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi). *Yogyakarta: Insist Press*.
- Haryanti, F. H. A. N. D. A. B. S. A. N. D. D. (2021). Strategi Pemasaran, Penjualan dan Produksi Olahan Rumput Laut Berbasis IT saat Pandemi Covid-19 di Padepokan Suket Segoro Semarang. *Journal of Marine Research*, 10(1), 138–146. <https://doi.org/10.14710/jmr.v10i1.29677>
- Ibnu, S. (2024). Exploring Political Socialization through the Lens of Giddens' Structuration Theory. *International Journal of Religion*, 5(11), 4034–4042. <https://doi.org/10.61707/AVXVJP17>
- Imran Siswadi, & Imam Yuliadi. (2025). Melawan Lupa: Kapitalisme Agraria dan Perlawanan Rakyat Lambu-Sape (Refleksi Gerakan Anti-Tambang di Sumbawa).

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2077–2083. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1909>
- Kelautan, K., & Perikanan, D. (2024). *Laporan Kinerja Kelautan dan Perikanan*.
- Langford, Z. (2023). Globalisation and livelihood transformations in the Indonesian seaweed industry. *Routledge*, 1–276. <https://doi.org/10.4324/9781003183860>
- McWilliam, A., Wianti, N. I., & Taufik, Y. (2020). Poverty and Prosperity Among Sama Bajo Fishing Communities (Southeast Sulawesi, Indonesia). *Singapore Journal of Tropical Geography*, 42(1), 132–148. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12349>
- Mengo, E., Grilli, G., Murray, J. M., Capuzzo, E., Eisma-Osorio, R. L., Fronkova, L., Etcuban, J. O., Ferrater-Gimena, J. A., & Tan, A. (2023). Seaweed aquaculture through the lens of gender: Participation, roles, pay and empowerment in Bantayan, Philippines. *Journal of Rural Studies*, 100, 103025. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2023.103025>
- N Selwyn. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *Journals.Sagepub.ComN SelwynNew Media & Society*, 2004•journals.Sagepub.Com, 6(3), 341–362. <https://doi.org/10.1177/1461444804042519>
- Pelras. (2000). Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi. *Brill.ComC PelrasAuthority and Enterprise*, 2000•brill.Com. https://brill.com/downloadpdf/display/book/edcoll/9789004486409/B9789004486409_s003.pdf
- Pribadi, S. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN KEPULAUAN SEBAGAI KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA. *Jurnal Maritim Indonesia*, 11(2). <https://doi.org/10.52307//jmi>
- Rahmat, Y. N., & Neilson, J. (2023). The ebb and flow of capital in Indonesian coastal production systems. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 44(2), 300–321. <https://doi.org/10.1111/G.12483;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>
- Rajab, M. A., Suhaeb, F. W., & Kamaruddin, S. A. (2025). Patron-Client in Socio Economic Relations of Fisherman in the Coastal Area of Bandar Lampung City, Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 43(2), 89–95. <https://doi.org/10.9734/AJAEES/2025/V43I22690>
- Razavi, S. (2009). Engendering the political economy of agrarian change. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 197–226. <https://doi.org/10.1080/03066150902820412>
- Rimmer, M. A., Larson, S., Lapong, I., Purnomo, A. H., Pong-masak, P. R., Swanepoel, L., & Paul, N. A. (2021). Seaweed aquaculture in Indonesia contributes to social and economic aspects of livelihoods and community wellbeing. *Sustainability (Switzerland)*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/SU131910946>
- Semedi, P., & Schneider, K. (2020). Fishers' Responses to the Danish Seiner Ban and the History of Fisheries Governance on the Java North Coast. *Maritime Studies*, 20(1), 43–62. <https://doi.org/10.1007/s40152-020-00202-1>
- Sunaryo, N. C. A. N. D. M. J. A. N. D. N. D. A. N. D. A. R. S. A. N. D. S. (2021). Introduksi “Bondre” Untuk Mengatasi Gagal Panen Rumput Laut Pada Cuaca Ekstrem di Pantai Jelenga Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3). <https://doi.org/10.29303/jpmp.v4i3.946>
- Torre-Castro, M. d. l., Lindström, L., Jiddawi, N., Pike, F., & Max, A. (2022). Women and Adaptive Capacity to Climate Change in East African Seascapes – Zanzibar as an Example. *Frontiers in Marine Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.931883>
- Weeratunge, N., Snyder, K. A., & Sze, C. P. (2010). Gleaner, Fisher, Trader, Processor: Understanding Gendered Employment in Fisheries and Aquaculture. *Fish and Fisheries*, 11(4), 405–420. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2010.00368.x>
- White B. (2012). Agrarian capitalism and peasant studies. In *books.google.com*. *Journal of Peasant Studies*.
- Wibowo, A., & Shohibuddin, M. (2023). *MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA* (A. Wibowo & M. Shohibuddin, Eds.). Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor.
- Zamroni, A., Laoubi, K., & Yamao, M. (2011). *The Development of Seaweed Farming as a Sustainable Coastal Management Method in Indonesia: An Opportunities and Constraints Assessment*. 1, 505–516. <https://doi.org/10.2495/sdp110421>